

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN
AKUNTANSI, DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Natasya Agatha¹⁾, Adam Zakaria²⁾, Ratna Anggraini³⁾
Universitas Negeri Jakarta

Correspondence		
Email: agathanatsya15@gmail.com	No. Telp: 081318538869	
Submitted: 27 Juni 2024	Accepted: 2 Juli 2024	Published: 3 Juli 2024

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memberikan bukti empiris atas pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sumber data primer yang didapatkan dari kuesioner yang disebarakan kepada ASN pada Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* melalui *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan IBM SPSS Statistics 25. Hasil dari penelitian ini adalah (a) kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada BKN; (b) pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada BKN; (c) sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada BKN.

Kata kunci: Kejelasan Sasaran Anggaran; Pengendalian Akuntansi; Sistem Pelaporan; Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pendahuluan

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari seseorang ataupun dari sebuah instansi/perusahaan. Tujuan mendasar dari akuntabilitas adalah agar seluruh kegiatan dan kinerja yang dijalankan dan dihasilkan oleh suatu instansi dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan yang seharusnya. Oleh sebab itu, akuntabilitas berkaitan secara langsung dengan pembukuan, administrasi, dan pelaporan (CNN Indonesia, 2023). Dalam mengimplementasikan akuntabilitas, sifat kepedulian merupakan bentuk awalan dari pelaksanaan akuntabilitas.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja di Indonesia masih lemah, diantaranya akuntabilitas kinerja yang masih belum mendapatkan perhatian yang besar terutama di tingkat kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja. Sehingga, dapat terlihat bahwa bentuk kepedulian dari instansi pemerintah akan akuntabilitas masih tergolong lemah.

Banyak kasus korupsi yang terjadi di sektor pemerintahan, yang dimana salah satu penyebab terjadinya korupsi tersebut adalah karena masih rendahnya pengawasan yang dilakukan. Pelaksanaan pengelolaan anggaran secara tidak transparan merupakan salah satu penyebab dari terjadinya korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas masih belum menjadi prioritas di sektor publik. Yang dimana evaluasi dari akuntabilitas kinerja pada sektor pemerintahan dapat menjadi alat untuk mengidentifikasi dan mengatasi kasus korupsi yang terjadi (Hasibuan & Syafina, 2022).



Akuntabilitas dalam instansi pemerintah jelas bertujuan untuk meningkatkan integritas, meningkatkan transparansi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja. Peraturan Menteri Pertahanan No. 32 Tahun 2015 menyatakan bahwa “Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik”.

Azizah & Widyawati (2020) menyatakan bahwa pemerintah wajib memenuhi akuntabilitasnya. Dimana dalam memenuhi akuntabilitas tersebut, pemerintah harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, yaitu anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Salah satu hal yang harus dilakukan untuk mencapai akuntabilitas dalam pemerintahan adalah transparansi pada sistem anggaran. Instansi pemerintah yang sehat ditandai dengan sistem anggaran yang terbuka serta pengelolaan anggaran yang efektif serta efisien. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka kinerja manajerial pada suatu instansi pemerintah akan terbantu. Dengan demikian, memudahkan untuk mempertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas dari suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuannya.

Selain kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi juga turut serta menjadi hal yang membuat akuntabilitas dari instansi pemerintah itu sendiri tercapai. Pengendalian akuntansi dapat menjadi alat dalam menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan adanya pengendalian akuntansi, maka instansi pemerintah dapat menilai serta mengontrol seluruh aktivitas dan tanggung jawab yang dilakukan instansi tersebut.

Sistem pelaporan merupakan salah satu kunci dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan meningkatkan kinerja pada instansi pemerintah. Oleh karena itu, sistem pelaporan memegang peran penting dalam memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam instansi pemerintah. LAN dan BPKP menyatakan bahwa laporan yang baik adalah laporan yang disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Sistem pelaporan yang baik sangat diperlukan untuk memantau dan mengendalikan pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan (Azizah & Widyawati, 2020)

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (A. S. I. Safitri, 2019). Semakin jelas sasaran anggaran, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin meningkat. Sesuai dengan penelitian (Widaryanti & Pancawardani, 2020), Isnanto et al. (2019), Harianto et al. (2021), Budiani & Asyik (2021), Mulya & Fauzihardani (2022), Azizah & Widyawati (2020) yang menunjukkan hal yang sama, yaitu kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adanya sasaran anggaran yang nyata, mempermudah kesuksesan penerapan tugas organisasi untuk memenuhi tujuan serta sasaran yang sudah diputuskan terdahulu. Namun, terdapat perbedaan hasil pada penelitian Pratama et al. (2019) yang mengemukakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal serupa juga ditemukan pada penelitian Mikoshi (2020) dan Aprilianti et al. (2020).

Selanjutnya, terdapat penelitian terdahulu yang menguji tentang pengaruh pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada penelitian Isnanto et al. (2019) menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Keberadaan pengendalian akuntansi meningkatkan akuntabilitas kinerja. Sejalan dengan penelitian dari Harianto et al. (2021), Mikoshi (2020), dan Pratama et al. (2019) yang juga menunjukkan

bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berbeda dengan penelitian yang sudah disebutkan, pada penelitian Hidayat et al. (2021) menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil yang sama juga ditemukan pada penelitian Widaryanti & Pancawardani (2020) dan Mulya & Fauzihardani (2022).

Selain kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem pelaporan merupakan kunci dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, sesuai dengan penelitian Harianto et al. (2021) yang menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut karena sistem pelaporan mencerminkan pertanggungjawaban dari anggota ke pimpinan. Sejalan dengan penelitian Isnanto et al. (2019), Budiani & Asyik (2021), Pratama et al. (2019), Azizah & Widyawati (2020), dan Aprilianti et al. (2020). Namun berbeda dengan penelitian Mulya & Fauzihardani (2022) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara”**.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan disampaikan adalah sebagai berikut (a) Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara; (b) Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara; (c) Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memberikan bukti empiris atas pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara, untuk mengetahui serta memberikan bukti empiris atas pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara, untuk mengetahui serta memberikan bukti empiris atas pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peran anggaran sangat penting dalam lingkup pemerintahan. Menurut Mardiasmo (2009) anggaran sektor publik dianggap sangat penting salah satunya karena anggaran merupakan alat pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjalin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Widaryanti & Pancawardani, 2020). Oleh sebab itu, kejelasan sasaran anggaran dapat membantu dalam mengukur kinerja instansi pemerintah.

Hal ini sejalan dengan penelitian A. S. I. Safitri (2019) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semakin jelas sasaran anggaran, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin meningkat. Sesuai dengan penelitian Widaryanti & Pancawardani (2020) yang juga menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penggunaan pengendalian akuntansi memungkinkan para manajer dapat membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja (Widaryanti & Pancawardani, 2020). Dengan adanya pengendalian akuntansi yang baik, maka dapat membantu serta memastikan bahwa kinerja pada instansi pemerintah berlangsung dengan baik, sehingga potensi terjadinya penyimpangan dapat terminimalisir.

Sesuai dengan penelitian Isnanto et al. (2019) yang menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Keberadaan pengendalian akuntansi meningkatkan akuntabilitas kinerja. Selaras dengan penelitian Pratama et al. (2019) yang menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja untuk menerapkan anggaran yang sudah ada (Pratama et al., 2019). Sistem pelaporan merupakan kunci dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Dalam memenuhi akuntabilitas publik, pemerintah wajib melaporkan keuangan dan kinerjanya secara detail. LAN dan BPKP menyatakan bahwa laporan yang baik adalah laporan yang disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Dengan demikian, dengan adanya sistem pelaporan yang baik akan menghasilkan laporan yang detail dan sesuai sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sesuai dengan penelitian Harianto et al. (2021) yang menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut karena sistem pelaporan mencerminkan pertanggungjawaban dari anggota ke pimpinan. Sejalan dengan penelitian Aprilianti et al. (2020) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena sistem pelaporan yang baik dapat memantau dan mengendalikan kinerja aparat dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, metode penelitian yang dipakai adalah kuantitatif. Berdasarkan unit analisis penelitian ini yaitu kantor pusat Badan Kepegawaian Negara, maka populasi dari penelitian ini adalah seluruh ASN kantor pusat Badan Kepegawaian Negara. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2019) *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Sehingga dengan demikian, dengan menggunakan teknik dari *non-probability sampling*, peneliti menjabarkan beberapa kriteria untuk memilih sampel dari populasi yang telah ditentukan. Adapun kriteria untuk

sampel pada penelitian ini, yaitu 1) Aparatur Sipil Negara yang bekerja di kantor pusat Badan Kepegawaian Negara, 2) Pendidikan minimal D3, 3) Bekerja pada bagian tata usaha dari tiap unit atau bekerja pada unit kerja Biro Keuangan pada kantor pusat Badan Kepegawaian Negara. Dari hasil seleksi sesuai kriteria diperoleh 71 sampel.

Pada penelitian ini, terdapat variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau *independent variable* atau variabel bebas adalah variabel yang nilainya mempengaruhi perubahan variabel dependen. Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1), Pengendalian Akuntansi (X_2), dan Sistem Pelaporan (X_3) merupakan variabel independen dari penelitian ini. Sementara, variabel dependen atau *dependent variable* atau variabel terikat merupakan variabel yang nilainya dapat dipengaruhi oleh nilai variabel independen. Variabel dependen dari penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Adapun indikator variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut

- 1) Kejelasan sasaran anggaran (X_1) dengan indikator spesifik, terukur, menantang namun realistis, berorientasi pada hasil akhir, dan memiliki batas waktu.
- 2) Pengendalian akuntansi (X_2) dengan indikator audit sebagai alat pengambilan keputusan, jangka waktu sebagai alat pengambilan keputusan, otorisasi pada transaksi, bukti pendukung setiap transaksi, pencatatan transaksi, pembaharuan catatan akuntansi, dan persetujuan laporan keuangan oleh kepala bagian keuangan.
- 3) Sistem pelaporan (X_3) dengan indikator penyajian laporan keuangan secara lengkap, informasi dalam laporan keuangan digunakan sebagai alat koreksi, informasi keuangan disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum bukan kebutuhan khusus, laporan keuangan dapat diuji, dan informasi keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik kuesioner yang dibagikan kepada para responden. Kuesioner yang disebar merujuk pada variabel bebas yaitu kejelasan sasaran anggaran (X_1), pengendalian akuntansi (X_2), sistem pelaporan (X_3) dan variabel terikat, yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Kuesioner tersebut diukur menggunakan model Skala Likert yaitu pengukuran atas sikap atau pendapat seseorang maupun kelompok untuk menampilkan tingkat persetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan menggunakan skala sebagai berikut (1) Sangat Tidak Setuju (STS), (2) Tidak Setuju (TS), (3) Setuju (S), dan (4) Sangat Setuju (SS).

Teknik Analisis Data

1) Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019). Untuk menguji data, peneliti menggunakan IBM SPSS Statistics 25.

2) Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah semua pernyataan (instrumen) penelitian yang diajukan untuk mengukur variabel penelitian adalah valid (Leon et al., 2023). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item yang ada pada kuesioner berkorelasi signifikan terhadap skor total dan dapat dinyatakan valid. Sebaliknya, jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka item kuesioner tidak valid.

- b. Uji Reliabilitas
- Menurut (Leon et al., 2023) reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran relatif konsisten jika pengukurannya diulangi dua kali atau lebih, atau sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Pada penelitian ini uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Cronbach's Coefficient Alpha* sebagai koefisien dari reliabilitas. Ketentuannya adalah jika nilai *Cronbach's Alpha* $\geq 0,6$ maka instrumen dari masing-masing variabel penelitian yang digunakan adalah reliabel. Sebaliknya, jika nilai *Alpha Cronbach* $< 0,6$ maka instrumen masing-masing variabel penelitian tidak reliabel.
- 3) Uji Asumsi Klasik
- a. Uji Normalitas
- Uji normalitas menurut Sugiyono (2019) bertujuan untuk mengkaji kenormalan variabel yang diteliti apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Kriteria pengambilan keputusan pada uji normalitas adalah variabel penelitian dinyatakan berdistribusi normal apabila memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 (Sig. $> 0,05$).
- 4) Uji Hipotesis
- a. Analisis Regresi Linear Berganda
- Analisis regresi linear berganda yaitu regresi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Imam Ghozali, 2021). Rumus persamaan regresi linear berganda secara umum jika dimasukkan variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut
- $$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$
- Keterangan:
- Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
a = Konstanta
 b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi
 X_1 = Kejelasan Sasaran Anggaran
 X_2 = Pengendalian Akuntansi
 X_3 = Sistem Pelaporan
e = *Error*
- b. Uji T
- Menurut Imam Ghozali (2021) uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dan nilai signifikansi $< 0,05$. Jika nilai t hitung $> t$ tabel dan nilai sig. $< 0,05$ maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen sehingga hipotesis penelitian diterima.
- c. Uji Simultan (F)
- Uji simultan (F) bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Jika nilai F hitung lebih besar $>$ dari F tabel dan nilai sig. $< 0,05$ maka artinya secara simultan (bersama-sama) variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Imam Ghozali, 2021).
- d. Uji Koefisien Determinasi *R Square* (R^2)
- Uji koefisien *R Square* (R^2) digunakan untuk mengukur proporsi variasi pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen pada model regresi. Nilai R^2 akan berkisar antara 0—1. Semakin tinggi nilai R^2 , semakin andal kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel dependen (Leon et al., 2023).

Hasil dan Pembahasan

Subjek Penelitian

Peneliti memperoleh data primer yang diperlukan melalui penyebaran kuesioner yang ditujukan kepada responden yang bekerja pada Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara, yaitu ASN yang bekerja pada bagian tata usaha dari tiap unit atau bekerja pada unit kerja Biro Keuangan pada kantor pusat Badan Kepegawaian Negara. Dimana sebelum data yang didapatkan diolah, peneliti terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap kuesioner dengan mengambil 20 responden dari seluruh jumlah responden. Responden yang telah dijadikan sebagai pengujian kuesioner ini, tidak akan digunakan kembali pada pengujian selanjutnya.

Dari 20 kuesioner yang disebar, didapati kuesioner yang kembali serta kuesioner yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 kuesioner. Dengan demikian, jawaban yang didapatkan dari 20 kuesioner tersebut akan dilakukan uji kualitas data, yang dimana akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk membuktikan apakah pernyataan dalam kuesioner yang disebar valid dan reliabel.

Setelah mendapatkan hasil dari uji validitas dan reliabilitas, maka dilakukan penyebaran kuesioner kembali kepada responden-responden yang dapat dijadikan sampel, yaitu sebanyak 51 responden. Dari 51 kuesioner yang disebar, didapati kuesioner yang kembali serta kuesioner yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 37 kuesioner. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, responden yang sedang bertugas keluar kota, melanjutkan studi, mengikuti pelatihan, dan faktor lainnya. Dengan demikian, tingkat pengembalian yang didapat adalah sebesar 73%.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif diperlukan untuk melihat gambaran data secara umum, seperti nilai Mean (rata-rata), Maximum (tertinggi), Minimum (terendah), dan Standar Deviasi dari masing-masing variabel). Berikut hasil uji statistik deskriptif adalah sebagai berikut

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Kejelasan Sasaran Anggaran	37	21	28	24.54	2.036
Pengendalian Akuntansi	37	21	28	24.76	2.178
Sistem Pelaporan	37	18	24	21.22	1.917
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	37	29	40	35.24	3.278
<i>Valid N (listwise)</i>	37				

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2024

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan menunjukkan bahwa seluruh pernyataan Valid, kecuali pernyataan X1.7 (pernyataan nomor 7 pada variabel Kejelasan Sasaran Anggaran) dinyatakan Tidak Valid karena nilai r hitung $<$ r tabel, yaitu r hitung sebesar 0,320 sementara r tabel sebesar 0,444. Sehingga, pernyataan yang Tidak Valid tersebut dihapus dan tidak termasuk dalam kuesioner yang akan dilakukan uji selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan diperoleh bahwa *Cronbach's Alpha* atas variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) sebesar 0,952, Kejelasan Sasaran

Anggaran (X1) sebesar 0,854, Pengendalian Akuntansi (X2) sebesar 0,854, dan Sistem Pelaporan (X3) sebesar 0,959. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tiap pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa item pernyataan dapat digunakan sebagai alat ukur dan mampu memperoleh data yang konsisten jika pengukurannya diulangi dua kali atau lebih.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas dan variabel terikat terdistribusi secara normal atau tidak. Kriteria pengambilan keputusan pada uji normalitas adalah variabel penelitian dinyatakan berdistribusi normal apabila memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 (Sig. > 0,05).

Berdasarkan hasil uji normalitas yang dilakukan, diperoleh nilai sig. sebesar 0,200. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel pada penelitian ini dapat dinyatakan terdistribusi normal karena memiliki tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 (0,200 > 0,05).

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Dari analisis regresi linear berganda dapat diketahui apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
<i>1 (Constant)</i>	2.941	3.388		.868	.392
Kejelasan Sasaran Anggaran	.394	.140	.242	2.813	.008
Pengendalian Akuntansi	.978	.144	.649	6.789	.000
Sistem Pelaporan	.836	.157	.489	5.328	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2024

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel 2., maka persamaan regresi linear berganda yang didapat dari uji ini adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah = $2,941 + 0,394X1 + 0,978X2 + 0,836X3 + e$.

Uji T

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen pada penelitian ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan cara nilai t hitung dengan t tabel dan nilai signifikansi < 0,05. Jika nilai t hitung > t tabel dan nilai sig. < 0,05 maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Berikut merupakan hasil uji t

Tabel 3. Hasil Uji T Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.941	3.388		.868	.392
Kejelasan Sasaran Anggaran	.394	.140	.242	2.813	.008
Pengendalian Akuntansi	.978	.144	.649	6.789	.000
Sistem Pelaporan	.836	.157	.489	5.328	.000

a. *Dependent Variable:* Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2024)

Berdasarkan hasil uji t yang terlampir pada tabel 3., dapat disimpulkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Jika nilai F hitung lebih besar > dari F tabel dan nilai sig. < 0,05 maka artinya secara simultan (bersama-sama) variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut merupakan hasil Uji F

Tabel 4. Hasil Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	301.799	3	100.600	52.127	.000 ^b
Residual	61.756	33	1.930		
Total	363.556	36			

a. *Dependent Variable:* Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

b. *Predictors:* (Constant), Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2024

Berdasarkan hasil uji F yang tertera pada tabel 4., dari uji F yang dilakukan diperoleh F hitung sebesar 52,127. Dengan demikian F hitung 52,127 > F tabel 2,66 dan nilai sig. 0,000 < 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Uji Koefisien Determinasi R Square (R²)

Uji koefisien determinasi R Square (R²) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi R Square (R²) Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.911 ^a	.830	.814	1.389

- a. *Predictors: (Constant)*, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan
- b. *Dependent Variable*: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Data diolah SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel 5., hasil uji koefisien determinasi yang disesuaikan R^2 adalah sebesar 0,814. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 81,4%.

Pembahasan

Pengaruh Kejelasan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai positif dan signifikan ini diperoleh dari hasil jawaban responden yang semuanya menjawab Setuju dan Sangat Setuju dari tiap pernyataan mengenai kejelasan sasaran anggaran pada Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara. Sehingga, dari jawaban tersebut dapat diketahui bahwa pada Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara sudah terdapat sasaran anggaran yang jelas dan dimengerti oleh tiap penanggungjawabnya, rencana kerja dan anggaran telah disesuaikan dengan RAPBN, dan tiap-tiap penanggungjawab anggaran mengetahui secara jelas hasil yang harus dicapai. Dengan demikian, diperoleh hasil yang positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah karena adanya kejelasan sasaran anggaran yang baik dan terbukti memiliki pengaruh yang penting untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Semakin baik kejelasan sasaran anggaran, maka semakin baik juga akuntabilitas kinerja yang dihasilkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian A. S. I. Safitri (2019) yang mengatakan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Semakin jelas sasaran anggaran, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin meningkat. Kejelasan sasaran anggaran sangat diperlukan demi mencapai kinerja dan menciptakan akuntabilitas yang diharapkan. Selain itu, hasil penelitian yang didapatkan ini juga sejalan dengan penelitian Isnanto et al. (2019), (Harianto et al. (2021), Widaryanti & Pancawardani (2020).

Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Akuntansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara. Nilai positif dan signifikan ini diperoleh dari hasil jawaban responden yang semuanya menjawab Setuju dan Sangat Setuju pada tiap pernyataan mengenai pengendalian akuntansi pada Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara. Sehingga, dari jawaban tersebut dapat diketahui bahwa pada Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara setiap transaksi yang ada sudah sesuai dengan sistem dan prosedur akuntansi, dokumen-dokumen yang relevan terkait suatu transaksi selalu disiapkan, hasil audit digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan, baik rencana jangka pendek maupun jangka panjang digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan, setiap transaksi dicatat dalam buku catatan akuntansi, dan laporan-laporan keuangan di-review dan disetujui terlebih dahulu oleh Kepala Subbagian Keuangan sebelum didistribusikan. Dengan demikian, diperoleh hasil yang positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, karena pengendalian akuntansi telah dilaksanakan dengan baik dan terbukti memiliki pengaruh yang penting untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Semakin tinggi pengendalian akuntansi yang dilakukan, maka semakin tinggi juga akuntabilitas kinerja yang dihasilkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Rio et al. (2019) yang menyatakan bahwa Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adanya pengendalian akuntansi yang baik dapat mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif. Selain itu sama halnya dengan kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi diharapkan dapat mempermudah untuk mempertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian yang sama juga ditemukan pada penelitian Deni et al. (2021) dan Medelyn (2020).

Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai positif dan signifikan ini diperoleh dari hasil jawaban responden yang semuanya menjawab Setuju dan Sangat Setuju dari tiap pernyataan mengenai sistem pelaporan pada Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara. Sehingga, dari jawaban tersebut dapat diketahui bahwa pada Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara telah menyajikan Laporan Keuangan secara lengkap berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yakni dengan menerbitkan laporan keuangan dan laporan keuangan tersebut selalu tepat waktu. Dengan demikian, diperoleh hasil yang positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah karena menunjukkan sistem pelaporan yang ada sudah terlaksana dengan baik dan memiliki pengaruh yang penting untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semakin baik sistem pelaporan yang dilaksanakan, maka semakin baik juga akuntabilitas kinerja yang dihasilkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Lutfiah (2021) yang menyatakan bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja yang telah dilakukan sesuai dengan standar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pertanggungjawaban terkait pelaporan dapat dengan mudah dicapai sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini juga memiliki hasil yang sama dengan penelitian Yogi et al. (2019), Deni et al. (2021), Dewi et al. (2020).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pengujian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara, maka dapat disimpulkan bahwa (a) Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara, (b) Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara, (c) Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara.

Saran

Agar penelitian selanjutnya memperoleh hasil yang lebih baik, maka dari keterbatasan yang ada, berikut merupakan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya yaitu (a) Mengambil objek penelitian yang lebih luas, seperti mengambil beberapa instansi pemerintah ataupun sektor pemerintahan sebagai objek penelitian agar hasil yang didapatkan semakin baik, (b) Mengambil sampel yang lebih banyak, hal ini bertujuan untuk memperluas hasil penelitian, (c)

Menambah variabel lain (seperti *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi) yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Referensi

- Abdullah, K. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Agustin, K. (2018). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Ketaatan Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta)*.
- Aprilianti, D., Wulan, M., & Kurniawan, H. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2).
- Azizah, A. N., & Widyawati, D. (2020). PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA.
- Bhakti, D. C., Pituringsih, E., & Widiastuty, E. (2015). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Manajerial. *Rumah Jurnal UIN Alauddin*, 5(1).
- Budiani, L. V., & Asyik, N. F. (n.d.). PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. 2021. www.surabaya.go.id
- CNN Indonesia. (2023, June 20). *Apa Itu Akuntabilitas? Ini Pengertian, Prinsip, dan Contohnya*.
- Depari, R. P. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Komitmen Organisasi, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru.
- Eli, M. N. (2019). *Pengantar Akuntansi*. Graha Mulia Utama CV.
- Hariato, D., Kennedy, & Zarefar, A. (2021). PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (AKIP). *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(1), 122–139. <https://doi.org/10.29303/jaa.v6i1.111>
- Hasanah, A. (2021). PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PENGENDALIAN AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) (STUDI KASUS PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL VI MEDAN). *UIN Sumatera Utara*.
- Hasibuan, H. A., & Syafina, L. (2022). URGENSI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK KORUPSI

KOLUSI DAN NEPOTISME PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA UTARA. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(4).<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i4.13408>

Hawalya, N. (2023). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros*.

Hidayat, T., Putri, A. M., & Murialti, N. (2021). *Pengaruh Good Governance, Kompetensi, Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar*. 1, 87–97.

Isnanto, Y., Suharno, & Widarno, B. (2019). *PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI, DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH*.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (n.d.). *Permasalahan dan Tindak Lanjut ke Depan*.

Kementerian Perhubungan. (2021, December 22). *PANDUAN SISTEM AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021*.

LAN RI. (2020, July 2). *Kupas Tuntas Akuntabilitas*.

Leon, F. M., Suryaputri, R. V., & P., T. K. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif: Manajemen, Keuangan, dan Akuntansi*. Salemba Empat.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.

Michael C. Jensen, & William H. Meckling. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4).

Mikoshi, M. S. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 192. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.116>

Mulya, H. G., & Fauzihardani, E. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4(1). <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>

Mulyono, & Yumari. (2017). *Strategi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran*. Yogyakarta: Deepublish.

Nurkholis, Moh. K. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*.

PPID Kota Blitar. (2015). *PPID Kota Blitar*.

Pratama, R., Agustin, H., & Taqwa, S. (2019). *PENGARUH PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN*

TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1).

- Precelina, D. D., & Wuryani, E. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jombang. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 7(3).
- Purwohedi, U. (2022). *Metode Penelitian Prinsip dan Praktik*. Raih Asa Sukses (Penebas Swadaya Group).
- Putra, D. (2013). Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*.
- Rahmawati, S. (2017). *Konflik Keagenan dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia* (Faisal, Ed.).
- Safitri, A. S. I. (2019). PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN AUDIT KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Empiris Kabupaten Mamuju Tengah). *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 2(2).
- Safitri, N. H. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen). *UPN VETERAN Yogyakarta*.
- Sasongko, C., & Parulian, S. R. (2010). *Anggaran*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. S. (2016). *Glosarium Istilah Pemerintahan* (1st ed.).
- Wirdayanti, & Pancawardani, N. L. (2020). ANALISIS PENGARUH PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*. <http://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe>
- Yulianto, A. R., & Mutaher, O. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati. *Jurnal Untirta*.